



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2020
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.

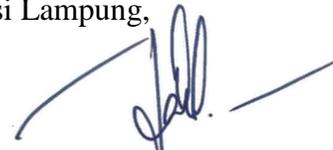
Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 dan RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 10 Program, 56 kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp.18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah), serta 6 Program, 20 kegiatan dengan dukungan dana APBN sebesar Rp.5.322.815.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan dan pencapaian kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2020

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung,



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, ST, MT.
NIP. 19730222 200312 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II RENCANA STRATEGIS	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dan Evaluasi Capaian IKU 2019 Murni	7
2.2 Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024	13
2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019 serta alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2019	15
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2020	22
BAB III PENUTUP	24
LAMPIRAN	
Lampiran Matrik RKT Tahun 2020	

B A B I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, oleh karenanya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan baik ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (good governance). Perencanaan pembangunan daerah tersebut harus secara terencana dan tersusun dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka Pendek.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya.

1.1.1. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 adalah:

- a) Untuk menjadi pedoman kerja dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) serta kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020.

- b) Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- c) Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja dan tingkat efektivitas hasil dan manfaat dari suatu program dan kegiatan.

1.1.2. RuangLingkup

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah suatu rencana jangka pendek dari instansi berupa perencanaan tahunan dengan memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung sebagai bentuk operasional untuk pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran dan tujuan. RKT disusun dan ditampilkan dalam suatu tabel RKT yang menginformasikan tentang sasaran dan indikator yang ingin dicapai (target) dalam 1 (satu) tahun anggaran 2020. Untuk pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan secara rinci dijelaskan berdasarkan indikator kegiatan (yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) dan masing-masing indikator memiliki target yang akan dicapai.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017)
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
 - 8) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
 - 9) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.
 - 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 80 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
- b) penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
- c) pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
- d) penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
- e) pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
- f) pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sepesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
- g) pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut urusan provinsi;
- h) pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
- i) pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- j) pelayanan administratif; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Pembinaan kepegawaian dan organisasi dilakukan dengan upaya melaksanakan kebijakan operasional yang ditetapkan, khususnya yang menyangkut pembinaan sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan profesionalisme SDM aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Perkembangan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung saat ini belum seimbang antara jumlah staf untuk masing-masing bidang/UPTD.

Tabel Data Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jabatan Struktural dan Fungsional (Semester I 2019)

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT /GOL	JUMLAH PEJABAT (orang)	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 144	S3 : 1	IV/d : 0	Ess IV = 30	3
L : 91	S2 : 44	IV/c : 1	Ess III = 10	
P : 53	S1 : 48	IV/b : 9	Ess II = 1	
	D4 : 3	IV/a : 17		
PTHL : 42	D3 : 8	III/d : 34		
L : 26	D2 : -	III/c : 23		
P : 16	D1 : -	III/b : 24		
	SLTA : 40	III/a : 9		
	SLTP : 1	II/d : 4		
	SD : 2	II/c : 11		
		II/b : 6		
		II/a : 3		
		I/d : 0		
		I/c : 3		
		I/b : 0		
		I/a : 0		

1.3.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahi :
 - 1) Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - 2) Seksi Jasa Kelautan dan Pendayagunaan Pesisir;
 - 3) Seksi Konservasi SDKP.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
 - 2) Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
- e. Bidang Perikanan Budidaya dan Penanganan Pasca Panen, membawahi :
 - 1) Seksi Perikanan Budidaya;

- 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- f. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
- 1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir;
 - 2) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Penanganan Hasil Perikanan;
 - 3) Seksi Penanganan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 5 (lima) UPTD yaitu:
- 1) UPTD Laboratorium Pengujian Dan Pengembangan Hasil Perikanan (LPPHP)
 - 2) UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
 - 3) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing
 - 4) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai
 - 5) UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

B A B II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dan Evaluasi Capaian IKU 2019

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2015-2019), yaitu :**“Lampung Maju dan Sejahtera 2019”** dengan Misi pembangunannya adalah :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, inovasi dan iptek, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sementara itu Program Prioritas Gubernur yang diusung selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2015-2019 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan adalah ‘Merevitalisasi dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan perikanan yaitu penangkapan ikan (laut) dan budidaya perikanan’.

Penetapan program prioritas tersebut, dan penanganan urusan pembangunan yang diarahkan pada dukungan pelaksanaan Misi ke-1 Pemerintah Provinsi Lampung yaitu:

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickle down effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, OPD Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- b. Program Pengembangan PerikananTangkap
- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- d. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
- e. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- f. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Program Kelautan dan Perikanan yang mendukung prioritas pembangunan Lampung ke 4 (empat) dan 5 (lima) adalah :

- a. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- b. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Mengacu kepada misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan

Tabel 2.1 Hubungan antara Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Akhir (2019)
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.	1. Produksi perikanan budidaya	Ribu Ton	197,74
		2. Produksi perikanan tangkap	Ribu Ton	190,155
2.	Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan	3. Luas kawasan konservasi perairan	Ribu ha	90
		4. Persentase terselesaikannya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	%	80

Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir RPJMD (2019)
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	1. Produksi perikanan budidaya	Ribu Ton	159,109	197,738
		2. Produksi perikanan tangkap	Ribu Ton	173,243	190,155
2.	Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan	3. Luas kawasan konservasi perairan	Ribu ha	50	90
		4. Persentase terselesaikannya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	%	NA	80

Evaluasi Capaian IKU Tahun 2019

Setiap organisasi perangkat daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) secara formal untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2015-2019 sebagaimana yang telah diamatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh OPD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel.2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	%
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	1. Produksi perikanan budidaya	Ribu Ton	197,74	118,89*	60,1
		2. Produksi perikanan tangkap	Ribu Ton	190,16	81,95*	43,1
2.	Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan	3. Luas kawasan konservasi perairan	Ribu ha	90	162,64	180,71
		4. Persentase terselesaikannya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	%	80	100	125

*) angka sementara (Semester I)

Sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (Dua) sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang tercermin dalam capaian 4 (Empat) Indikator Kinerja. Secara rinci capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang didukung oleh masing-masing program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya

Indikator Kinerja Utama sektor kelautan dan perikanan adalah Produksi Perikanan yang dibagi menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Capaian indikator tersebut sangat tergantung pada kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh nelayan dan pembudidaya ikan dimasing-masing kabupaten/kota. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk memfasilitasi, melakukan pembinaan, memberikan bantuan kepada pembudidaya ikan skala kecil/pemula, nelayan kecil dan kegiatan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi produksi dan produktifitas pelaku usaha perikanan.

Indikator Kinerja 1 yaitu jumlah produksi perikanan budidaya, dari target tahun 2019

sebesar 197.740 ton sudah tercapai 118.885* ton atau sebesar 60,1%* disemester 1 tahun 2019. Data produksi perikanan budidaya diperoleh dari penjumlahan data-data produksi perikanan budidaya dari kabupaten/kota. Data produksi perikanan budidaya terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung dan mina padi. Berdasarkan data semester 1 tersebut, diperkirakan pada tahun 2019 target produksi perikanan budidaya dapat tercapai. Produksi perikanan budidaya Lampung sebagian besar didominasi komoditas Udang yang juga merupakan komoditas ekspor utama Provinsi Lampung.

Indikator Kinerja 2 yaitu jumlah produksi perikanan tangkap, dari target tahun 2019 sebesar 190.155 ton baru tercapai 81.950* ton atau sebesar 43,1%. Data produksi perikanan tangkap diperoleh dari penjumlahan data-data produksi kabupaten/kota yang memiliki kawasan perairan laut dan nelayan serta hasil tangkapan dari perairan umum seperti sungai, waduk, danau dan rawa-rawa. Berdasarkan capaian Semester I tersebut, diperkirakan target produksi perikanan tangkap sulit tercapai. Penyebab utama dari penurunan jumlah produksi perikanan tangkap diduga disebabkan polemik pelarangan alat tangkap cantrang, dogol dan trawl serta proses peralihan ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Selain itu faktor musim dan cuaca ekstrim sangat mempengaruhi hasil tangkapan dan jumlah hari melaut.

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Provinsi dalam mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil semakin diperkuat. Untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan, maka aspek konservasi harus mendapat perhatian yang baik dan proporsional sejalan dengan peningkatan terhadap pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja 3 yaitu Persentase luas kawasan konservasi perairan. Luas kawasan pesisir yang dihitung adalah kawasan yang sudah ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan konservasi perairan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Kawasan konservasi tersebut dapat berupa daerah perlindungan laut (DPL), kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan kawasan konservasi perairan (KKP). Berdasarkan data yang ada, sampai dengan tahun 2019 terdapat beberapa kawasan konservasi yaitu:

1. Daerah Perlindungan Laut (DPL) Pulau Sebesi, perairan Gunung Krakatau, luas ±58ha.

2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) di pesisir Pesisir Barat (ex. Lampung Barat) yang ditetapkan oleh SK Bupati Lampung Barat Nomor: B/206/KPTS/II.12/2012. Kawasan tersebut meliputi Pesisir Pantai Pekon Muara Tembulih, Desa Sukanegara dan Desa Gedung Cahaya Kuningan Kec. Ngambur (5.741ha) dan Pulau Betuah, Pekon Bandar Dalam, Kec. Bengkunt Belimbing (9.718ha).
3. Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan seluas 72.211,68ha;
4. Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas seluas 60.397,21ha;
5. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Batang Segama Lampung timur seluas 14.569,30ha.

Indikator Kinerja 4 yaitu Persentase terselesaikannya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan. Target indikator kinerja berupa kasus yang ditangani atau difasilitasi penyelesaiannya. Berdasarkan data yang dihimpun sejak tahun 2018 terdapat beberapa permasalahan/ kasus terkait pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung yang ditangani/ difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu:

1. Rencana pembangunan wisata bahari ‘Pulau Tegal Mas’ di Pulau Tegal, bahwa telah terjadi kegiatan fisik yang merubah bentuk bentang alam/morfologi pantai yang dapat mengganggu ekosistem. Pelaksanaan kegiatan di lokasi ini belum memiliki ijin sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perpres Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tahun 2019, PT. Tegal Mas sudah memproses perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian permasalahan ‘Pulau Tegal Mas’ ini juga sampai dibahas di Pokja IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus dibawah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal ini disebabkan dalam perkembangannya, terdapat dua penegak hukum dari institusi yang berbeda (Polda Lampung dan KLHK) yang masih menangani objek yang sama. Deputi Kemenko meminta kasus tersebut dapat segera diselesaikan agar tidak menghambat investasi terutama pariwisata dan bila memungkinkan tidak ada unsur pidana tetapi hukuman denda atau ganti rugi yang pantas.

2.2 Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2024), yaitu :*“Rakyat Lampung Berjaya”*; dengan 6 misi pembangunannya yaitu:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Selain itu dalam Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu **Program Nelayan Berjaya**, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
- c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia.
- d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
- e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus akan mendukung pencapaian **Misi ke 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan dan Misi ke 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5, dilakukan melalui meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana

serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha.

Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan untuk mendukung Misi ke 5 tersebut yaitu:

- a. Program Pengembangan PerikananTangkap
- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- c. Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan
- d. Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-6, dilakukan melalui Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan ke 14, Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan alokasi ruang laut yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup serta didukung pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Untuk melaksanakan Misi ke 6 tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program :

- a. Program Program Pengelolaan Ruang Laut
- b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tabel.2.4 Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Srategis dan Indikator Sasaran Renstra Tahun 2019 – 2020

No.	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1.	Rakyat Lampung Berjaya	(5) Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	Pencapaian (Prosentase) Produksi Perikanan
				Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan
		(6) Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Pencapaian Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)

2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019 serta alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2019

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mendapat Alokasi Anggaran Tahun 2019 dari APBD Provinsi Lampung sebesar **Rp.51.733.877.000,-** (*Lima Puluh Satu Milyar Tujuh ratus tiga puluh tiga Juta delapan ratus tujuh puluh tujuh Ribu Rupiah*); yang terdiri dari **Belanja Langsung** sejumlah **Rp.38.943.749.000,-** (*tiga puluh delapan Milyar sembilan Ratus empat Puluh tiga Juta Tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah*), dan **belanja tidak langsung** sejumlah **Rp.12.790.128.000,-** (*Dua Belas Milyar tujuh Ratus sembilan Puluh Juta seratus dua puluh delapan Ribu Rupiah*) yang dibagi dalam 10 (sepuluh) program, dan 44 (empat puluh empat) Kegiatan. Berdasarkan Hasil pembahasan PPAS Perubahan oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD, APBD Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan 2 (dua) kali rasionalisasi, yaitu rasionalisasi pertama sebesar 22,073 Milyar; ditambah dengan rasionalisasi kedua sebesar 6,5 Milyar; sehingga Total Efisiensi APBD P TA. 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar **28,573 Milyar (73,4%)**. Pagu Anggaran Belanja Langsung setelah efisiensi menjadi sebesar **Rp.10.370.749.000,-** (*Sepuluh Milyar Tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) dengan realisasi mencapai 98,71 % . Rincian alokasi dan realisasi anggaran masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan **APBD Perubahan** Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN			LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME/ OUTPUT)	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		%	
							Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
03				URUSAN PILIHAN						
03	01			Kelautan dan Perikanan						
3	01	01		Dinas Kelautan dan Perikanan						
03	01	15		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir			821.557.401	821.557.401	100	
03	01	15	006	Kegiatan Bidang KP3K	Provinsi Lampung	Pelatihan tranplantasi terumbu karang di Perairan Provinsi Lampung	5 lokasi	349.059.501	349.059.501	100
03	01	15	009	Perencanaan penataan ruang dan pengelolaan wilayah laut, Pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Lampung	Sosialisasi dan koordinasi Perda RZWP3K dan Masterplan	14 Kali	183.839.000	183.839.000	100
03	01	15	010	Pendayagunaan Pesisir, pulau-pulau kecil dan jasa kelautan	Pesisir Brt, Tanggamus	Sarana dan prasarana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	12 Bulan	135.617.300	135.617.300	100
03	01	15	011	Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan perairan dan jenis biota	Pesisir Barat, Tanggamus	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10000 Ha	92.250.000	92.250.000	100
03	01	15	012	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha ekonomi Produktif	Pesisir Barat	Sarana dan prasarana pengelolaan ekowisata	8 Keg	50.000.000	50.000.000	100
03	01	15	013	Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Lampung	Sosialisasi, identifikasi, dan verifikasi perizinan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	67 Kali	10.791.600	10.791.600	100

KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME/ OUTPUT)	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		%
								Anggaran	Realisasi	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
03	01	16		Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut				148.620.466	148.620.466	100
03	01	16	004	Peningkatan kesadaran hukum dan penegakkan hukum dalam perdayagunaan sumberdaya laut	Provinsi Lampung	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina	15 kab/kota	60.512.850	60.512.850	100
03	01	16	005	Pengembangan Pengawasan SDKP yang partisipatif	Bandar Lampung	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pemantauan Lokasi SDKP dan Pos Jaga	12 Lokasi	88.107.616	88.107.616	100
03	01	16	006	Penanganan dan penindakan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	Provinsi Lampung	Kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan yang ditangani	10 kasus	0	0	
03	01	17		Program pengembangan budidaya perikanan				1.280.466.543	1.280.466.543	100
03	01	17	028	Jaminan Keamanan Mutu Hasil Perikanan Budidaya	Provinsi Lampung	Terlaksananya Sosialisasi,Pelatihan dan pembinaan CBIB	15 kab/kota	51.312.800	51.312.800	100
03	01	17	036	Pendampingan Prasehatkan	Provinsi Lampung	Terlaksananya Sosialisasi,Pelatihan dan pembinaan Pra Sehat KAN	15 kab/kota	24.875.000	24.875.000	100
03	01	17	037	Bantuan Benih ikan Pada Pembudidaya skala kecil	Provinsi Lampung	Terlaksananya kegiatan bantuan benih ikan	1 Paket	935.992.864	935.992.864	100
03	01	17	054	Operasional unit Pembenihan Pemerintah	Purbolinggo, Lampung Timur	Operasional BBIS	12 Bulan	96.469.879	96.469.879	100
03	01	17	055	Pengembangan prasarana perikanan budidaya	Provinsi Lampung	Terlaksananya pengadaan sarana dan Prasarana Budidaya	-	171.816.000	171.816.000	100

KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME/ OUTPUT)	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		%
								Anggaran	Realisasi	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
03	01	18		Program pengembangan perikanan tangkap				5.086.924.455	4.955.773.255	97
03	01	18	021	Kegiatan Bidang Tangkap (DAK)	PPP Lempasing	Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan	1 paket	4.193.457.000	4.062.305.800	97
03	01	18	024	Restocking (Penebaran Benih ikan) di Perairan Umum Daratan (PUD) dan Sosialisasi rumah ikan	Lampung Utara dan Way Kanan	Terlaksananya Restocking (Penebaran Benih ikan) di Perairan Umum Daratan (PUD)	1 paket	192.626.610	192.626.610	100
03	01	18	025	Bantuan Paket Penangkapan Ikan untuk nelayan skala kecil	Provinsi Lampung	Tersedianya Bantuan Paket Penangkapan Ikan untuk nelayan skala kecil	1 paket	73.200.000	73.200.000	100
03	01	18	030	Peningkatan Pelayanan Kesyahbandaran di pelabuhan Perikanan	Provinsi Lampung	Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	3 Lokasi	16.870.000	16.870.000	100
03	01	18	034	Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	Provinsi Lampung	Jumlah Kapal Perikanan yang telah terdaftar	100 Unit	14.508.250	14.508.250	100
03	01	18	035	Penerapan CPIB di pelabuhan Perikanan dan diatas kapal perikanan	Provinsi Lampung	Pendataan, pembinaan, dan evaluasi CPIB di Pelabuhan Perikanan	1 Tahun	59.710.250	59.710.250	100
03	01	18	037	Pembinaan dan penataan pelayanan perizinan kewenangan daerah	Provinsi Lampung	Jumlah pembinaan dan pelayanan prima dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap	2	55.036.820	55.036.820	100
03	01	18	038	Pembinaan kenelayanan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kab/kota pesisir	Jumlah Lokasi Pembinaan	8 kab/kota	35.813.850	35.813.850	100
03	01	18	039	Operasional kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I	PPP Lempasing	Jumlah UPTD PP Wilayah I yang dikelola (UPTD)	1 Lokasi	267.279.405	267.279.405	100

KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME/ OUTPUT)	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		%
								Anggaran	Realisasi	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
03	01	18	040	Operasional kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	PPP Teladas dan Labuhan Meringgai	Jumlah UPTD PP Wilayah II yang dikelola (UPTD)	2 Lokasi	76.987.600	76.987.600	100
03	01	18	041	Operasional kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	PPP Kota Agung	Jumlah UPTD PP Wilayah III yang dikelola (UPTD)	1 Lokasi	101.434.670	101.434.670	100
03	01	19		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				606.453.198	606.453.198	100
03	01	19	007	Lomba Masak Ikan Khas Lampung Dalam Rangka HUT Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Jumlah Kab/Kota yang berpartisipasi lomba masak ikan	15 kab/kota	167.638.600	167.638.600	100
03	01	19	012	Apresiasi / Pelatihan Pembina Mutu Daerah	Bandar Lampung	Jumlah pembina mutu yang berkompeten memahami GMP, SSOP dan HACCP	25 Orang	57.078.100	57.078.100	100
03	01	19	014	Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Perikanan export dan konsumsi Lokal	Bandar Lampung	Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan untuk Ekspor dan Konsumsi Lokal	250 sample	381.736.498	381.736.498	100
03	01	20		Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan				113.089.060	113.089.060	100
03	01	20	001	Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Bandar Lampung	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	15 Dokumen	98.921.710	98.921.710	100
03	01	20	006	Sinkronisasi data dan program ke Kab/Kota dan Pusat	Bandar Lampung	Jumlah dokumen perencanaan dan statistik	3 dokumen	14.167.350	14.167.350	100

KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME/ OUTPUT)	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		%
								Anggaran	Realisasi	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
03	01	20		Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan				57.500.000	57.500.000	100
03	01	20	001	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Bandar Lampung	Kegiatan Pameran dan Media Informasi yang disediakan	3 kegiatan	57.500.000	57.500.000	100
05				URUSAN PENDUKUNG						
05	04			Non Urusan (Eks BAU)						
3	01	01		Dinas Kelautan dan Perikanan						
05	04	15		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.163.996.037	2.161.477.348	100
05	04	15	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bandar Lampung	jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	397.148.015	394.649.432	99,37
05	04	15	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bandar Lampung	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	1.147.495.106	1.147.475.000	100
05	04	15	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bandar Lampung	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	13.060.000	13.060.000	100
05	04	15	010	Penyediaan alat tulis kantor	Bandar Lampung	Alat tulis kantor	12 Bulan	13.999.200	13.999.200	100
05	04	15	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bandar Lampung	Barang-barang cetak(kop surat, amplop, DOP, SPPD dan kwitansi) dan fotocopy serta penjiilidan	12 Bulan	15.819.500	15.819.500	100
05	04	15	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bandar Lampung	Surat kabar, majalah, dan buku perundang-undangan	12 Bulan	20.250.000	20.250.000	100
05	04	15	017	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Bandar Lampung	makanan dan minuman	12 Bulan	13.195.000	13.195.000	100

KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME/ OUTPUT)	TARGET KINERJA	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		%
								Anggaran	Realisasi	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
05	04	15	018	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bandar Lampung	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	119.567.298	119.567.298	100
05	04	15	040	Operasional Pelelangan	Bandar Lampung	,	12 Bulan	323.133.577	323.133.577	100
05	04	15	046	Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Pengelolaan jaringan SIPKD	12 Bulan	59.151.891	59.151.891	100
05	04	15	071	Penatausahaan Asset SKPD	Bandar Lampung	Penatausahaan aset SKPD	12 Bulan	41.176.450	41.176.450	100
05	04	16		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				92.141.860	92.141.840	100
05	04	16	018	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bandar Lampung	Perbaikan gedung kantor	1 Paket	7.500.000	7.500.000	100
05	04	16	020	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bandar Lampung	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	12 Bulan	84.641.860	84.641.840	100
05	04	19		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0	0	-
05	04	19	012	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai/Aparatur	Bandar Lampung	Terlaksananya pengembangan sumberdaya aparatur	70 Orang	0	0	-
								10.370.749.020	10.237.079.111	98,71

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2020

Mengacu kepada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019 – 2020 yang telah ditetapkan, target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tabel.2.6 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2020.

Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator sasaran	Target Capaian Indikator Sasaran 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	100 (380.149)
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	100 (19.859)
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama			
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase) pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	80

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mendapat Alokasi Anggaran Tahun 2020 dalam APBD Provinsi Lampung sebesar **Rp.31.754.608.334,-** (*Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji) Rp.13.754.608.334,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.18.000.000.000,-. Pada tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 10 Program dan 57 Kegiatan, meliputi **4 Program Administrasi Umum/Operasional OPD** dan **6 Program Prioritas** untuk mendukung Visi, Misi dan Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2019 – 2024 yaitu: **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”** (*aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera*), dengan pencapaian misi yang akan didukung yaitu:

Misi 5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, melalui Program

1. Pengembangan Perikanan Tangkap
2. Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan
4. Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan

Misi 6: Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, melalui Program

5. Pengelolaan Ruang Laut

6. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Matrik Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan dan indikator sasaran tahun 2020 sebagaimana dalam Lampiran Matrik RKT.

B A B III

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga pencapaian Target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat mencapai 100%.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020 ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020.

Telukbetung, Januari 2020
Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Lampung,



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, ST, MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19730222 200312 1 010

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

No	TUJUAN RENSTRA				SASARAN RENSTRA				PROGRAM					KEGIATAN					Pagu anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target 2020	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2020	
1	Meningkatkannya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.	2) Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	1,63	1) Meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	%	100	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan pendapatan nelayan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	188.790,09	Meningkatnya Jumlah PUD yang dikelola dan memiliki inventarisasi potensi sumberdaya ikan.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Jumlah PUD yang dikelola dan lokasi inventarisasi potensi sumberdaya ikan.	Kab/kota	2	105.000.000
														Program pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan (PPRB) di Provinsi Lampung	Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan	Jumlah lokasi program pengelolaan perikanan ranjungan berkelanjutan (PPRB)	Kab/Kota	3	85.000.000
														Meningkatnya Jumlah PUD yang dikelola	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Jumlah dokumen data SDI yang tersedia.	dokumen	5	-
											NTN	-	117,69	Meningkatnya sarana dan prasarana nelayan yang memenuhi standar	Penyediaan sarana dan prasarana nelayan	Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang memenuhi standar (paket)	paket	10	119.914.000
														Meningkatnya kapal perikanan yang terdaftar dan memiliki tanda kapal	Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	Jumlah kapal perikanan yang didaftarkan dan memiliki tanda kapal (unit)	unit	100	28.728.000
														Meningkatnya kegiatan pembinaan dan monitoring kepada nelayan	Pembinaan dan monitoring program kenelayanan	Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilaksanakan(kegiatan)	kegiatan	30	15.260.000
														Meningkatnya kompetensi dan jaminan nelayan/ kelompok	Peningkatan kompetensi dan jaminan nelayan berjaya	Jumlah nelayan/ kelompok yang meningkat kompetensinya (orang)	orang	1000	263.796.000
														Meningkatnya jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap	Pembinaan dan Penataan Pelayanan Perizinan Kewenangan Daerah	Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap (lokasi)	Nelayan	200	27.021.000
														Meningkatnya jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarananya (pelabuhan)	Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Lampung	Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarananya (pelabuhan)	Pelabuhan	2	6.104.206.000
														Pelayanan Kesyahbandaran dan Penerbitan SHTI di Pelabuhan Perikanan	Peningkatan pelayanan kesyahbandaran dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan	Jumlah lokasi Pelayanan Kesyahbandaran dan Penerbitan SHTI di Pelabuhan Perikanan (pelabuhan)	Pelabuhan	3	41.000.000

No	TUJUAN RENSTRA				SASARAN RENSTRA				PROGRAM					KEGIATAN					Pagu anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target 2020	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2020	
														Meningkatnya jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina	Pembinaan dan pendampingan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Pelabuhan dan TPI Hygienis	Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina (Pelabuhan)	Pelabuhan	9	100.000.000
														Meningkatnya pengelolaan UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I yang dikelola (UPTD)	PPP	1	800.000.000
														Meningkatnya pengelolaan UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II yang dikelola (UPTD)	PPP	2	600.000.000
														Meningkatnya pengelolaan UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III yang dikelola (UPTD)	PPP	1	925.544.000
								Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	191.358,54	Meningkatnya jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Kelompok Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina (kelompok)	Kelompok	60	25.000.000	
										NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya)	-	97,28	Meningkatnya kompetensi pembudidaya ikan	Peningkatan kompetensi SDM kelompok pembudidaya ikan.	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkatkan kompetensinya (pembudidaya)	Pembudidaya	60	50.000.000	
													Meningkatnya jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan	Pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	paket	20	120.000.000	
													Meningkatnya keamanan pakan dan bebas residu	Monitoring pakan, obat ikan, residu dan penyakit serta pendampingan audit	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan (kegiatan)	kegiatan	15	26.000.000	
										Produksi benih	juta ekor	13.634,44	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan	Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)	paket	30	500.000.000	
													UPTD Balai Benih Ikan yang operasional dengan baik	Operasional Kegiatan di UPTD Balai Budidaya	Jumlah UPTD Balai Benih Ikan yang dibiayai operasionalnya (UPTD)	UPTD	1	250.000.000	

No	TUJUAN RENSTRA				SASARAN RENSTRA				PROGRAM					KEGIATAN					Pagu anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target 2020	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2020	
					2) Meningkat-nya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase Pencapaian ekspor perikanan	%	100	Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perikanan	Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan	Volume Ekspor Produk Perikanan	Kg	19.859.765	Jumlah sasaran/peserta yang menerima pemberian makanan tambahan berbahan ikan	Peningkatan Konsumsi melalui Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah sasaran/peserta yang menerima pemberian makanan tambahan berbahan ikan	Peserta	2.100	144.000.000
								Meningkatnya Konsumsi Ikan penduduk		Tingkat Konsumsi Ikan penduduk	(Kg/Kap /Thn)	34,54	Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi/ meningkat kompetensinya	Pembinaan dan Peningkatan kompetensi kelompok pengolah dan pemasar	Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi/ meningkat kompetensinya	orang	90	40.000.000	
													Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan	Pengembangan sentra pengolahan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengolah dan pemasar	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan	paket	10	480.000.000	
													Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi/ data yang disusun (dokumen)	Pengelolaan data potensi dan investasi, promosi serta kemitraan	Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi/ data yang disusun (dokumen)	dokumen	2	10.000.000	
								Meningkatnya Jumlah Usaha Perikanan yang sesuai mutu (standar)	Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang sesuai mutu (standar)	unit	15	Jumlah produk, UMKM, UPI dan unit budidaya yang sesuai standar	Pengembangan produk dan standarisasi hasil perikanan	Jumlah produk, UMKM, UPI dan unit budidaya yang sesuai standar	Unit	15	150.000.000	
													Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	Monitoring Keamanan Pangan dan Pelaksanaan Pengujian Hasil Perikanan Hulu sampai Hilir	Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	sampel	300	300.000.000	
													Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya	Operasional UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya	laboratorium	1	400.000.000	
													Jumlah lembaga terakreditasi yang disediakan operasionalnya	Peningkatan kualitas layanan di UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah lembaga terakreditasi yang disediakan operasionalnya	Lembaga	2	-	

No	TUJUAN RENSTRA				SASARAN RENSTRA				PROGRAM					KEGIATAN					Pagu anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target 2020	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2020	
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama																			
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas udara serta meningkatkan kualitas tutupan lahan	34) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	59,63	3) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Pencapaian Persentase pelaku usaha yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	80	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut	Program Pengelolaan Ruang Laut	Prosentase Pelaku usaha yang patuh terhadap alokasi ruang laut	%	80	Tersedianya dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksanaannya	Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Laut	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksanaannya yang diterbitkan	dokumen	2	83.868.000
														Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik	Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Jasa Kelautan	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik	lokasi	3	53.856.000
														Meningkatnya jumlah pemanfaatan/perizinan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai peraturan	Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah pemanfaatan/perizinan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai peraturan	%	80	450.000.000
														Meningkatnya Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	ha	192.240	79.860.000
														Meningkatnya kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	Operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	lokasi	2	540.000.000
														Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku	Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/diawasi	Unit	45	50.054.000
														Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Jumlah pokmaswas yang dibina	pokmaswas	18	52.642.000

No	TUJUAN RENSTRA				SASARAN RENSTRA				PROGRAM					KEGIATAN					Pagu anggaran (Rp.)
	Uraian	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target 2020	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2020	
														Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku	Penanganan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	%	100	14.662.000
														Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku	Penyediaan Operasional Patroli Laut dan Pemeliharaan Kapal Pengawasan	Tersedianya Operasional Kapal Pengawasan mendukung patroli laut	unit	2	301.480.000
														Meningkatnya Jumlah Sarana prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan SDM Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang disediakan	paket	5	75.000.000
														Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku	Bantuan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang terlibat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	kab/kota	7	-